

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes sendiri adalah forum tertinggi yang melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. Dalam proses ini setidaknya ada dua pertemuan besar yang melibatkan seluruh elemen penting warga desa secara perwakilan. Yang pertama adalah sosialisasi dan pembentukan tim yang bertugas mengawal seluruh proses pembentukan dan pertemuan kedua untuk melahirkan berbagai keputusan final. Seluruh proses ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi

kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa (PemDes). Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kekacauan dan penyimpangan ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal, seperti koperasi. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Maka dari itu perlu adanya perhatian khusus mengenai pengelolaan keuangan BUMDes yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar, untuk itu, perlu dilakukannya manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Di sisi lain, pemerintah desa diharapkan juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi (Suwondo: 2015).

Berdasarkan pada latar belakang diatas, pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Gumukmas perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan laporan keuangan yang dimiliki BUMDes BUMI EMAS. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang “ANALISIS

PENGELOLAAN BUMDES (Studi Kasus pada BUMDES Bumi Emas Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”.
Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”.
Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Bumi Emas di Desa Gumukmas?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes Bumi Emas di Desa Gumukmas.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes khususnya pada desa yang ada di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
2. Bagi pemerintah desa, bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan BUMDes untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya desa di Kecamatan Gumukmas.
3. Bagi Almamater, diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.